

PERAN LITERASI DIGITAL DALAM MENANGKAL DISINFORMASI DI ERA KEMAJUAN TEKNOLOGI DAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-QUR'AN KLASIK DAN KONTEMPORER (Studi Komparasi Tafsir Al-Tabari dan Tafsir Al-Misbah)

Joko Purboyo^{1*}, Abdur Rokhim Hasan,² Kerwanto,³

Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Konsentrasi Kajian Al-Qur'an, Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta

*Email Correspondence: joko.purboyo@gmail.com¹

Received: 01-06-2026 | Revised: 20-06-2026 | Accepted: 30-06-2026 | Published: 13-07-2026

Abstract

This study concludes that digital literacy plays a vital role in countering disinformation in the era of technological advancement and information openness. Based on a comparative analysis of Tafsir at-Ṭabari (classical) and Tafsir al-Miṣbāḥ (contemporary), both interpretations emphasize the importance of tabayyun (information verification), as found in QS. Al-Ḥujurāt [49]: 6. Tafsir at-Ṭabari stresses the necessity of verifying reports from untrustworthy sources to prevent decisions based on falsehoods, while Tafsir al-Miṣbāḥ contextualizes this principle in the digital age by promoting information filtering, source evaluation, and critical awareness. This conclusion is further reinforced by Jean Baudrillard's theory of hyperreality, in which truth is often replaced by what becomes viral, rather than factual. F. Budi Hardiman adds that today's digital society is polarized between two extremes: religious radicalism and post-truth relativism both of which exacerbate the spread of disinformation. Hence, ethical and critically informed digital literacy is essential for safeguarding information integrity and fostering a healthy digital environment. The findings are consistent with previous scholarly works. For instance, Panji Ansari and Abdillah (2022) emphasize the relevance of QS. 49:6 in combating hoaxes through tabayyun, source awareness, and media discernment. Similarly, various Islamic communication studies underscore media literacy and verification as collective efforts against misinformation. These similarities reveal a convergence between Islamic scriptural interpretation and contemporary academic perspectives regarding the urgency of digital literacy to uphold social harmony amid rampant falsehood. Nonetheless, this thesis offers a broader and more interdisciplinary approach than earlier works. Rocky Romansyah (2022), for example, focuses solely on contemporary exegesis without incorporating philosophical frameworks. Muhammad Thaef Ashshiddiqi (2019) adopts a normative-descriptive method without comparing classical and modern tafsir. Likewise, Dwi Putri Aulia's (2018) study is limited to anti-hoax activism without engaging tafsir or theoretical analysis. This thesis therefore presents a distinct contribution by integrating Qur'anic values with philosophical thought. The methodology employed is qualitative-descriptive using a library research approach with comparative analysis. Primary sources include Tafsir Jāmi' al-Bayān by al-Ṭabari and Tafsir al-Miṣbāḥ by Quraish Shihab. Secondary sources involve literature on digital literacy, disinformation, and the works of Jean Baudrillard and F. Budi Hardiman. Analysis was conducted through interpretation of tafsir texts, thematic comparison between classical and modern perspectives, and theoretical integration to formulate an ethical-literary framework for addressing digital disinformation effectively.

Keywords: Digital literacy, disinformation, Qur'anic exegesis, tabayyun, Tafsir at-Ṭabari, Tafsir al-Miṣbāḥ, Jean Baudrillard, F. Budi Hardiman, post-truth, hyperreality, information ethics

Abstrak

Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi digital memiliki peran vital dalam menangkali disinformasi di era teknologi informasi. Berdasarkan kajian komparatif terhadap *Tafsir at-Ṭabari* dan *Tafsir al-Miṣbāḥ*, ditemukan bahwa kedua tafsir menekankan pentingnya prinsip *tabayyun* (verifikasi informasi), sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Ḥujurāt [49]: 6. *Tafsir at-Ṭabari* menekankan urgensi menyelidiki kabar dari sumber tidak kredibel agar keputusan tidak dilandasi informasi palsu, sementara *Tafsir al-Miṣbāḥ* mengadaptasi prinsip ini dalam konteks digital, mendorong pemilahan dan evaluasi kritis terhadap informasi. Perspektif Jean Baudrillard memperkuat temuan tersebut dengan menjelaskan bahwa dalam masyarakat hiperrealitas, kebenaran sering kali digantikan oleh apa yang viral, bukan fakta. F. Budi Hardiman menambahkan bahwa masyarakat digital kini terjebak antara radikalisme agama dan relativisme kebenaran (*post-truth*), yang keduanya memperburuk penyebaran disinformasi.

Oleh karena itu, literasi digital yang berbasis etika dan kesadaran kritis dipandang penting dalam menyaring informasi dan membentuk ruang digital yang sehat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Panji Ansari & Abdillah (2022) yang menegaskan relevansi QS. 49:6 sebagai solusi terhadap hoaks melalui prinsip *tabayyun*, penyaringan sumber, dan peningkatan pemahaman informasi. Kajian-kajian komunikasi Islam juga menekankan literasi media dan verifikasi sebagai sarana kolektif menghadapi kabar bohong. Kesamaan ini menunjukkan konsistensi antara pandangan tafsir keislaman dan pendekatan akademik kontemporer dalam menguatkan pentingnya literasi digital sebagai alat penjaga harmoni sosial. Namun demikian, pendekatan tesis ini berbeda dari beberapa karya ilmiah sebelumnya. Misalnya, Rocky Romansyah (2022) hanya membahas tafsir kontemporer tanpa menggunakan kerangka teori filsafat. Muhammad Thaeef Ashshiddiqi (2019) mengkaji ayat-ayat hoaks secara normatif-deskriptif tanpa menyandingkan tafsir klasik dan modern. Dwi Putri Aulia (2018) pun hanya menyoroti gerakan anti-hoaks tanpa keterlibatan kajian tafsir atau teori kritis. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi yang lebih luas melalui pendekatan interdisipliner. Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka dan analisis komparatif. Sumber primer meliputi *Tafsir Jāmi' al-Bayān* karya Imam at-Ṭabari dan *Tafsir al-Miṣbāḥ* karya M. Quraish Shihab. Data sekunder mencakup literatur literasi digital, teori disinformasi, dan karya Jean Baudrillard serta F. Budi Hardiman. Proses analisis mencakup interpretasi teks tafsir, perbandingan tematik antara klasik dan kontemporer, serta integrasi pemikiran filosofis untuk merumuskan kerangka etis-literatif guna menghadapi disinformasi secara efektif.

Kata kunci: Literasi digital, disinformasi, tafsir al-Qur'an, tabayyun, Tafsir at-Ṭabari, Tafsir al-Miṣbāḥ, Jean Baudrillard, F. Budi Hardiman, post-truth, hiperrealitas, etika informasi

PENDAHULUAN

Revolusi teknologi informasi telah membawa masyarakat ke dalam era digital yang penuh kemudahan akses informasi. Media sosial menjadi salah satu instrumen utama dalam penyebaran informasi, menawarkan akses cepat dan luas terhadap berbagai jenis informasi memungkinkan siapa saja untuk memproduksi, menyebarkan, dan mengonsumsi konten secara bebas. Berdasarkan laporan *Digital 2023 Global Overview* oleh *We Are Social* dan *Hootsuite*, tercatat lebih dari 5 miliar orang di dunia kini memiliki akses internet dan 4,9 miliar di antaranya menggunakan media sosial secara aktif setiap harinya. Namun, kemudahan ini tidak selalu membuat masyarakat menjadi lebih terinformasi dengan baik (*well-informed*). Sebaliknya, arus informasi yang tidak terkontrol sering kali menyebabkan *information overload* atau banjir informasi.

Fenomena ini tidak terlepas dari sifat media sosial yang memberikan kebebasan tanpa batas dalam menyebarkan informasi. Konten-konten yang beredar tidak selalu diverifikasi terlebih dahulu, sehingga masyarakat kerap menerima informasi yang tidak valid atau bahkan menyesatkan. Hal ini menjadi masalah serius yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik. Banyak orang yang terpapar informasi yang tidak akurat atau menyesatkan tanpa memiliki kemampuan untuk memverifikasi kebenarannya. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik, bahkan perpecahan di masyarakat. Dampak negatif dari disinformasi dapat meluas ke berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan publik, proses demokrasi, dan hubungan interpersonal.

Dalam konteks Indonesia, dengan lebih dari 212 juta pengguna internet, rendahnya literasi digital memperburuk keadaan. Laporan Indeks Literasi Digital Nasional 2021 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada tingkat sedang, terutama pada aspek kemampuan berpikir kritis.

Salah satu tantangan terbesar di era digital adalah disinformasi, yaitu penyebaran informasi palsu dengan tujuan tertentu, seperti manipulasi opini publik atau keuntungan finansial.⁷ Platform media sosial

seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan *TikTok* menjadi saluran utama penyebaran disinformasi. Hal ini terjadi karena sifat media sosial yang interaktif, cepat, dan mampu menjangkau audiens yang sangat luas. Penelitian oleh Vosoughi, Roy dan Aral menemukan bahwa disinformasi menyebar enam kali lebih cepat daripada informasi yang benar di media sosial. Di Indonesia, penyebaran *hoaks* yang terkait isu politik, agama, dan kesehatan semakin meningkat, terutama melalui platform seperti *WhatsApp* dan *Facebook*. Data dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) menunjukkan lebih dari 2.000 kasus *hoaks* terdeteksi sepanjang 2022, dengan mayoritas melibatkan isu-isu sensitif seperti agama dan politik.

Disinformasi di media sosial memiliki beberapa penyebab utama:

1. Sistem Algoritme Platform Media Sosial

Platform media sosial menggunakan algoritme untuk menampilkan konten yang paling mungkin menarik perhatian pengguna. Konten yang sensasional, kontroversial, atau emosional cenderung mendapatkan lebih banyak perhatian dan interaksi. Hal ini sering kali mendorong penyebaran disinformasi karena informasi palsu biasanya dirancang untuk memicu emosi, seperti kemarahan atau ketakutan.

2. Kurangnya Verifikasi Informasi

Banyak pengguna media sosial cenderung membagikan informasi tanpa memeriksa keakuratannya. Sebuah survei oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa mayoritas pengguna media sosial di Indonesia pernah menyebarkan informasi yang salah karena percaya bahwa informasi tersebut benar. Hal ini diperburuk oleh sifat *confirmation bias*, di mana orang lebih cenderung menerima informasi yang sejalan dengan pandangan mereka.

3. Motif Ekonomi dan Politik

Disinformasi sering kali dibuat dengan tujuan tertentu, seperti mendapatkan keuntungan finansial melalui klik (*clickbait*), memengaruhi opini politik, atau memecah belah masyarakat. Misalnya, selama pemilu, *hoaks* sering digunakan untuk mendiskreditkan kandidat tertentu atau memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan tertentu.

4. Kurangnya Literasi Digital

Tingkat literasi digital yang rendah memperburuk penyebaran disinformasi. Banyak masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk mengevaluasi kredibilitas sumber informasi, mengenali bias, atau memahami konteks suatu berita.

Disinformasi yang tersebar luas di media sosial telah menjadi ancaman nyata yang membawa dampak negatif signifikan terhadap tatanan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Fenomena ini tidak hanya merusak alur informasi yang seharusnya objektif dan terpercaya, tetapi juga secara aktif membentuk opini publik dengan cara yang menyesatkan. Salah satu dampak paling mencolok dari disinformasi adalah terjadinya polarisasi sosial. Ketika informasi yang keliru atau menyesatkan dikonsumsi tanpa verifikasi, masyarakat cenderung memperkuat bias yang sudah ada sebelumnya. Algoritme media sosial yang bekerja berdasarkan preferensi pengguna pun memperparah kondisi ini, menciptakan ruang gema (*echo chamber*) di mana individu hanya terpapar pada pandangan yang memperkuat keyakinannya. Akibatnya, terjadi konflik baik antarindividu maupun antarkelompok yang memiliki pandangan berbeda, sehingga memperlebar jurang perpecahan sosial. Selanjutnya, disinformasi juga memberikan dampak serius terhadap proses demokrasi. Dalam ranah politik, penyebaran informasi palsu sering kali digunakan sebagai alat propaganda untuk memanipulasi opini

publik. Praktik ini menciptakan persepsi yang keliru terhadap realitas politik, mengaburkan informasi yang benar, dan membentuk opini berdasarkan kebohongan yang terstruktur. Terakhir, tidak dapat diabaikan bahwa disinformasi juga menimbulkan kerusakan reputasi dan kehidupan individu secara personal. Orang yang menjadi target dari kampanye disinformasi dapat mengalami penderitaan yang besar, baik secara psikologis, finansial, maupun sosial. Fitnah atau *hoaks* yang menyebar dengan cepat melalui media sosial dapat merusak nama baik seseorang dalam hitungan jam, bahkan menit. Dalam banyak kasus, korban mengalami gangguan mental, kehilangan pekerjaan, terisolasi dari lingkungan sosial, dan menghadapi kesulitan hukum, padahal mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Dampak seperti ini memperlihatkan bagaimana disinformasi bukan hanya sekadar kesalahan informasi, tetapi juga bentuk kekerasan simbolik yang dapat menghancurkan kehidupan manusia secara nyata.

Dengan demikian, disinformasi di media sosial merupakan ancaman serius yang harus ditangani secara multidisipliner. Diperlukan langkah-langkah strategis, mulai dari penguatan literasi digital, regulasi platform digital, hingga kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, literasi digital menjadi keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki setiap individu. Literasi digital mencakup kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis di dunia digital. Dengan literasi digital yang baik, seseorang dapat lebih mudah mengenali dan menangkal disinformasi yang beredar.

Literasi digital menjadi salah satu solusi utama dalam menghadapi permasalahan disinformasi. Gilster mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format yang dikomunikasikan melalui teknologi digital. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga pemikiran kritis, verifikasi informasi, dan pemahaman tentang algoritme media sosial. Dalam konteks Indonesia, literasi digital yang lemah menjadi salah satu faktor utama yang membuat masyarakat rentan terhadap disinformasi.

Dalam ajaran Islam, penyebaran informasi yang salah adalah tindakan yang dikecam karena dapat menyebabkan fitnah dan kerusakan sosial. Tafsir al-Misbah oleh M. Quraish Shihab menekankan pentingnya kehati-hatian agar tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya.

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi saat ini, ayat tersebut dapat diinterpretasikan sebagai anjuran untuk meningkatkan literasi digital guna menangkal disinformasi. Prinsip verifikasi yang diajarkan dalam ayat ini sangat relevan dengan kebutuhan untuk memeriksa kebenaran informasi di era digital, di mana berita dan informasi dapat dengan mudah dimanipulasi atau disalahartikan.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat juga dapat dilihat sebagai bentuk realisasi dari ayat-ayat al-Qur'an yang mengajak manusia untuk menggunakan akal dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Namun, perkembangan ini harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan literasi digital untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara bijak dan bertanggung jawab.

Dalam menghadapi tantangan disinformasi di era digital, perspektif tafsir al-Qur'an memberikan landasan moral dan etika yang kuat. Al-Qur'an mengajarkan pentingnya mencari ilmu, verifikasi informasi, dan menjunjung tinggi kebenaran. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dengan upaya meningkatkan literasi digital dan menangkal disinformasi. Oleh karena itu, pengembangan literasi digital dalam kerangka ajaran al-Qur'an menjadi sangat penting. Hal ini mencakup tidak hanya kemampuan

teknis dalam menggunakan teknologi informasi, tetapi juga pemahaman etis dan moral tentang bagaimana informasi harus dikelola dan disebar.

Pendekatan ini dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih kritis, bertanggung jawab, dan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara positif. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, integrasi nilai-nilai al-Qur'an dalam pengembangan literasi digital dapat menjadi pendekatan yang efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan dan sosialisasi yang menggabungkan ajaran al-Qur'an dengan keterampilan literasi digital modern.

Selain itu, perlu adanya kolaborasi antara ahli agama, pakar teknologi informasi, dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi komprehensif dalam menangani disinformasi. Strategi ini harus mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, dan spiritual untuk menciptakan pendekatan holistik dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Penting juga untuk memahami bahwa tantangan disinformasi bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga masalah sosial dan budaya. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil harus mempertimbangkan konteks lokal dan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat Indonesia.

Dengan mengacu pada tafsir al-Qur'an, literasi digital dapat diimplementasikan sebagai berikut:

1. Prinsip Tabayun Sebagai Verifikasi Informasi

Dalam tafsir Al-Qur'an, tabayun adalah langkah pertama yang harus dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi.

2. Penerapan Etika Bermedia

Nilai-nilai seperti amanah dan sidik harus diterapkan dalam penggunaan media sosial untuk mencegah penyebaran informasi yang salah.

3. Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan dan Agama

Integrasi literasi digital dengan pendidikan Islam dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi.

Peran literasi digital dalam menangkal disinformasi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Dengan memperkuat literasi digital yang berlandaskan pada prinsip tabayun, masyarakat dapat menjadi lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di media sosial. Selain itu, penguatan nilai-nilai keislaman dalam bermedia dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menciptakan masyarakat yang *well-informed* di era digital.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada kajian komparatif terhadap Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Jāmi' al-Bayān karya Imam al-Ṭabarī. Pemilihan kedua tafsir tersebut didasarkan pada perbedaan pendekatan yang saling melengkapi, yakni tafsir kontemporer yang kontekstual dan tafsir klasik bercorak bi al-ma'tsūr, sehingga mampu memberikan perspektif yang komprehensif mengenai konsep verifikasi informasi, etika komunikasi, dan penanggulangan disinformasi berdasarkan Al-Qur'an. Fokus analisis diarahkan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan tabayyun, khususnya QS. al-Ḥujūrāt [49]: 6 dan QS. al-Isrā' [17]: 36, guna mengkaji relevansinya terhadap tantangan literasi digital di era modern (Baidan & Aziz, 2016; al-Ṭabarī, 1954).

Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi dengan memanfaatkan sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan beserta penafsirannya dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir Jāmi' al-Bayān,

serta didukung sumber sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, dan penelitian terdahulu mengenai literasi digital, media, dan disinformasi. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitik melalui content analysis, analisis tematik, dan analisis komparatif untuk mengidentifikasi konsep tabayyun, etika penyebaran informasi, serta membandingkan relevansi penafsiran klasik dan kontemporer dalam menjawab persoalan disinformasi di era digital (Sugiyono, 2019; Moleong, 2017).

Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur primer dan sekunder sehingga meningkatkan kredibilitas serta validitas temuan penelitian. Adapun sistematika penulisan tesis disusun berdasarkan Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta yang terdiri atas lima bab, meliputi pendahuluan, landasan teori mengenai literasi digital dan disinformasi, kajian tafsir klasik dan kontemporer, analisis komparatif terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, serta penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Struktur tersebut dirancang agar penelitian tersusun secara sistematis, komprehensif, dan mampu memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam pengembangan literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an (Pascasarjana PTIQ, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 6 dalam Perspektif Literasi Digital untuk Menangkal Disinformasi Menurut Tafsir At-Thabari dan Tafsir Al-Misbah

Surah Al-Hujurat ayat 6 mengandung prinsip tabayyun sebagai landasan etika dalam menerima dan menyebarkan informasi. Tafsir At-Thabari menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa Al-Walid bin 'Uqbah yang membawa informasi keliru tentang Bani Musthaliq, sehingga menegaskan kewajiban memverifikasi berita dari sumber yang tidak kredibel agar terhindar dari kesalahan, kezaliman, dan penyesalan. Sementara itu, Quraish Shihab melalui Tafsir Al-Misbah memperluas makna tabayyun sebagai sikap kritis, objektif, dan proporsional dalam menyikapi informasi, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepercayaan terhadap sumber yang kredibel dan kewaspadaan terhadap informasi yang meragukan.

Komparasi kedua tafsir menunjukkan bahwa meskipun berbeda dalam pendekatan dan konteks penafsirannya, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun budaya verifikasi informasi sebagai bagian dari akhlak dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut sangat relevan dengan konsep literasi digital di era modern, khususnya dalam menghadapi maraknya hoaks dan disinformasi melalui media digital. Implementasi tabayyun diwujudkan melalui evaluasi kredibilitas sumber, verifikasi isi informasi, pengendalian diri sebelum menyebarkan berita, serta penguatan budaya literasi dan etika bermedia. Dengan demikian, ajaran Al-Qur'an tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga memberikan landasan normatif bagi terbentuknya masyarakat digital yang kritis, bertanggung jawab, dan berakhlak dalam menyikapi arus informasi.

Analisis Tafsir Surat Al Isra Ayat 36 dalam Konteks Literasi Digital untuk Menangkal Disinformasi

Surah Al-Isra ayat 36 mengandung prinsip fundamental agar setiap individu tidak mengikuti, mempercayai, ataupun menyebarkan sesuatu tanpa didasarkan pada pengetahuan yang benar. Dalam tafsir Imam At-Thabari, larangan tersebut mencakup segala bentuk ucapan, tuduhan, kesaksian, dan penyampaian informasi yang tidak memiliki dasar yang sah. Melalui penjelasan linguistik, istilah *lā*

taqfu dimaknai sebagai larangan mengikuti, meniru, atau menyebarkan informasi tanpa verifikasi, sedangkan penyebutan pendengaran, penglihatan, dan hati menegaskan bahwa seluruh proses memperoleh serta menggunakan informasi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT.

At-Thabari menjelaskan bahwa ayat ini tidak memiliki sebab turun yang bersifat khusus, melainkan merupakan pedoman moral yang berlaku universal bagi seluruh umat manusia. Larangan berkata tanpa ilmu, menyampaikan kesaksian palsu, serta menuduh orang lain tanpa bukti dipandang sebagai bentuk penyimpangan yang dapat merusak keadilan dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, setiap informasi harus didasarkan pada ilmu, bukti, dan proses verifikasi sebelum diyakini maupun disampaikan kepada orang lain.

Dalam konteks era digital, pesan QS. Al-Isra ayat 36 memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap penguatan literasi digital dan pencegahan disinformasi. Prinsip untuk tidak mengikuti informasi tanpa dasar sejalan dengan konsep berpikir kritis, verifikasi sumber, pengecekan fakta, serta tanggung jawab etis dalam menggunakan media digital. Nilai-nilai tersebut mendorong masyarakat agar tidak mudah terpengaruh hoaks, fitnah, maupun informasi manipulatif, melainkan membangun budaya bermedia yang cerdas, bertanggung jawab, dan berlandaskan kejujuran sehingga tercipta ruang digital yang lebih sehat dan berkeadaban.

Analisis Sikap Tafsir Al-Qur'an terhadap Pemikiran Jead Baudrillard dan F. Budi Hardiman

Derasnya arus informasi di era digital telah meningkatkan penyebaran hoaks, misinformasi, dan fenomena *post-truth*, sehingga kebenaran sering kali dikalahkan oleh emosi dan opini publik. Dalam perspektif Islam, QS. Al-Hujurat:6, QS. An-Nur:15, dan QS. Al-Isra:36 menegaskan pentingnya tabayyun, kehati-hatian dalam menerima informasi, serta larangan menyebarkan berita tanpa dasar pengetahuan. Di sisi lain, pemikiran Jean Baudrillard mengenai simulakra, hiperrealitas, dan krisis representasi serta gagasan F. Budi Hardiman tentang etika klik, ruang publik digital, dan etika diskursus menawarkan kerangka kritis untuk memahami tantangan komunikasi di era digital. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menganalisis secara komparatif tafsir klasik At-Tabari dan tafsir kontemporer Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab terhadap ketiga ayat tersebut, kemudian mengkaji kesesuaian maupun pertentangannya dengan pemikiran Baudrillard dan Hardiman guna merumuskan landasan etika informasi yang relevan dalam menghadapi disinformasi di era digital.

1. Surat Al-Hujurat Ayat 6: Tabayyun sebagai Etika Verifikasi Informasi Secara umum, ayat ini mengandung perintah tegas kepada komunitas beriman untuk tidak langsung mempercayai informasi yang dibawa oleh orang berkarakter fasik (jangan yang terang-terangan jahat, yang diragukan integritasnya pun perlu diwaspadai), melainkan harus klarifikasi atau investigasi kebenaran berita tersebut sebelum bertindak atas dasar berita itu. Tujuannya jelas, agar keputusan atau aksi yang diambil tidak didasarkan pada informasi palsu yang dapat mencelakakan pihak tak bersalah, yang akhirnya berujung penyesalan. Dalam ayat ini terdapat kata kunci "*fatabayyanū*" yang sebagian qirā'ah lain dibaca "*fatathabbatū*" keduanya bermakna mirip: "telitilah/cek kebenarannya". Konsep tabayyun di sini menjadi prinsip etika: kehati-hatian dan skeptisisme sehat terhadap kabar, terutama dari sumber yang tidak tepercaya, adalah kewajiban moral bagi orang beriman.

Menurut At-Tabari, QS. Al-Hujurat ayat 6 turun berkaitan dengan peristiwa Al-Walid bin 'Uqbah yang menyampaikan laporan keliru mengenai Bani Mustaliq, sehingga Allah memerintahkan kaum

Muslim untuk melakukan tabayyun sebelum mengambil keputusan. At-Tabari menegaskan bahwa berita dari orang fasik tidak boleh langsung diterima, melainkan harus diverifikasi karena dapat menimbulkan kezaliman dan kerusakan sosial, sekaligus menjadikan ayat ini sebagai dasar penting dalam etika informasi dan hukum Islam. Sementara itu, Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah mengafirmasi konteks historis tersebut, tetapi menekankan bahwa tabayyun harus diterapkan secara proporsional, terutama terhadap informasi penting atau yang berasal dari sumber yang diragukan, agar tidak menimbulkan budaya saling curiga dalam masyarakat. Dengan demikian, kedua mufasir sama-sama menempatkan tabayyun sebagai prinsip utama dalam menerima informasi, namun Quraish Shihab memperluas penerapannya ke konteks media modern dengan menekankan verifikasi, klarifikasi, dan sikap kritis sebagai fondasi etika komunikasi di era digital.

a. Kesesuaian dengan Pemikiran Baudrillard

Jika dibandingkan dengan pemikiran Jean Baudrillard, tafsir QS. Al-Hujurat ayat 6 menunjukkan kesesuaian dalam menekankan kewaspadaan terhadap distorsi realitas dan pentingnya sikap kritis terhadap informasi. Baudrillard melalui konsep simulakra dan hiperrealitas menjelaskan bahwa masyarakat modern sulit membedakan fakta dan ilusi, sedangkan Al-Qur'an melalui prinsip tabayyun memerintahkan verifikasi informasi agar tidak terjerumus pada kesalahan dan penyesalan. Tafsir At-Tabari dan Quraish Shihab memperkuat nilai tersebut dengan menegaskan bahwa informasi dari sumber yang tidak kredibel harus diuji kebenarannya, bahkan Quraish Shihab mengaitkannya secara langsung dengan fenomena hoaks dan banjir informasi di era digital. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada aspek epistemologis, karena Al-Qur'an meyakini bahwa kebenaran objektif dapat ditemukan melalui verifikasi, akal, dan wahyu, sedangkan Baudrillard cenderung memandang realitas modern sebagai ruang yang dipenuhi simulasi sehingga kebenaran menjadi semakin sulit dipastikan. Oleh karena itu, nilai Qur'ani menawarkan landasan etis yang lebih optimistis untuk menghadapi krisis informasi, sementara pemikiran Baudrillard lebih berfungsi sebagai kritik terhadap kondisi masyarakat yang terjebak dalam hiperrealitas tanpa memberikan solusi normatif yang tegas.

b. Kesesuaian dengan Pemikiran Hardiman

Beranjak ke F. Budi Hardiman, sikap tafsir QS 49:6 amat jelas selaras (pro) dengan gagasan Hardiman mengenai etika klik dan etika komunikasi digital. Hardiman berulang kali menekankan perlunya verifikasi informasi sebelum bertindak. Dalam orasi digitalnya, Hardiman nyaris menggemakan perintah *tabayyun* Qur'ani ketika ia berkata, "*filasafat mengajak orang berpikir untuk menemukan kebenaran... Hal ini diperlukan di zaman komunikasi digital yang baru*". Ia prihatin bahwa pengguna gawai acap tidak peduli apakah informasi itu benar atau tidak sebelum meng-klik dan menyebarkannya, padahal satu klik tak bertanggung jawab bisa berdampak buruk luas. Ini tepat sejalan dengan ruh QS 49:6: "jangan sampai kalian karena ceroboh menyebar atau bertindak atas berita yang belum jelas, lalu menyesal akibat dampaknya." Hardiman melihat contoh kontemporer betapa "satu klik menimbulkan kerusakan" misalnya kasus kabar palsu penculikan yang memicu massa main hakim sendiri. Itu analog dengan konteks ayat: satu kabar bohong hampir menimbulkan perang.

Quraish Shihab dalam tafsirnya sudah mengkontekstualisasikan ayat ini untuk era media sosial, persis area yang Hardiman bicarakan. Quraish mengingatkan agar jangan "mudah membenarkan informasi" di zaman banjir berita bias, sementara Hardiman memperingatkan bahwa media sosial dipenuhi hoaks yang "merajalela tak terbendung" hingga "kebenaran seakan hilang" bila pengguna tidak kritis.

Keduanya menawarkan resep sama: *periksa dulu!* Bisa dikatakan, nilai tabayyun adalah inti dari “etika klik”. Hardiman sebagai filsuf mungkin tidak menyebut istilah tabayyun, tapi konsepnya identik: check and recheck, berpikir sebelum klik. Bahkan Hardiman merumuskan semacam versi sekuler dari QS 49:6: “*You shall not accept any information, unless you verify it for yourself*”. Meskipun kutipan terjemahan tersebut sebenarnya berasal dari publikasi lain, namun sejalan dengan pandangan Hardiman dan inti ayat.

Dari segi etika diskursus, Hardiman yang terpengaruh Habermas menekankan keharusan kejujuran, ketulusan, dan klaim kebenaran yang dapat diuji dalam setiap komunikasi publik. Hoaks jelas melanggar etika diskursus ini. QS 49:6 memberikan landasan normatif yang kuat bagi hal tersebut: tidak boleh ada keputusan kolektif diambil berdasarkan berita yang belum teruji. Secara tidak langsung, ayat ini juga mengajarkan tanggung jawab kolektif dalam menjaga kebenaran informasi di masyarakat. Hardiman menyoroti bahwa di ruang publik digital, tanggung jawab ini melekat pada setiap individu yang punya akses *share* atau *post* konten. Jadi, penafsiran QS 49:6 mendukung penuh pandangan Hardiman bahwa keterbukaan informasi harus diiringi akuntabilitas moral dari tiap pengguna.

Apakah ada aspek kontra antara tafsir ayat ini dengan Hardiman? Secara substansi nilai, nyaris tidak ada pertentangan. Keduanya bersinergi: seorang Muslim yang mengamalkan tabayyun otomatis menjalankan etika klik; seorang netizen yang mempraktikkan etika klik telah menjalankan perintah agama (meski mungkin ia tidak niat religius). Namun, bila ditinjau basis filosofi, Hardiman beroperasi dalam kerangka rasional-sekuler (ia bicara menyelamatkan demokrasi, menjaga ruang publik), sedangkan Quran berbasis keimanan (seruan ditujukan “wahai orang beriman”). Bagi Hardiman, hoaks itu buruk karena melanggar *prinsip diskursus dan membahayakan masyarakat demokratis*. Bagi tafsir Qur'an, kabar bohong itu dosa dan melanggar hak orang lain serta bisa berujung penyesalan di dunia dan akhirat. Tujuan akhirnya sejalan, meski landasan justifikasi beda: Hardiman ke ranah etika sosial, Qur'an ke ranah etika religius (yang tentu juga berdampak sosial). Ini bisa dianggap perbedaan sudut pandang, tapi bukan pertentangan tajam – lebih pada bahasa berbeda untuk nilai yang sama. Hardiman mungkin tidak mengaitkan dengan dosa/pahala, melainkan dampak empiris, tapi itu tidak menjadikan nilainya bertolak belakang, justru saling melengkapi.

Satu-satunya kemungkinan kontra: Hardiman fokus pada kondisi digital modern. Apakah tafsir klasik At-Tabari dapat menangkap kompleksitas era digital? Tentu tidak, namun di sinilah relevansi tafsir kontemporer Al-Mishbah yang mampu menjembatani. Quraish Shihab mengaktualisasikan ajaran tabayyun untuk era “banjir informasi di media sosial”. Ia secara eksplisit membahas perilaku di internet (meski tidak menyebut “klik”, esensinya sama). Jadi, tafsir Al-Mishbah sejalan sangat erat dengan Hardiman. Tafsir At-Tabari, walau ditulis jauh sebelum internet, mengajarkan prinsip yang menjadi dasar etika Hardiman. Hanya saja, At-Tabari tak membahas “orang fasik di internet” karena konteks belum ada. Tetapi bila konsep orang fasik pembawa berita kita terapkan, “orang fasik” era kini bisa berarti akun anonim penyebar hoaks; prinsip At-Tabari jelas: jangan percaya, cek dulu. Itu pun sama dengan pesan Hardiman.

Dengan demikian, untuk QS 49:6, dapat disimpulkan bahwa nilai yang dibawa kedua mufasir (kewajiban tabayyun) mendapat dukungan kuat dari pemikiran Hardiman. Tidak ditemukan pertentangan berarti, kecuali Hardiman mungkin akan menyoroti perlunya sistem sosial (misal: literasi digital, regulasi platform) sebagai pelengkap tindakan individu – hal yang di luar cakupan tafsir individual ayat tapi selaras

dengan semangatnya. Secara holistik, tafsir Quran dan Hardiman bersekutu melawan hoaks, menekankan verifikasi dan kejujuran.

2. QS. Al-Isra: 36: Larangan Mengikuti Tanpa Ilmu dan Akuntabilitas Indera-Akal

Ayat ini memberi dua pesan utama: (1) Larangan mengikuti/mengatakan suatu hal tanpa ilmu yang jelas bisa dimaknai jangan ikut-ikutan atau membenarkan sesuatu tanpa dasar pengetahuan. (2) Setiap pancaindra dan hati (akal) manusia akan dimintai pertanggungjawaban moral oleh Allah atas apa yang mereka lakukan. Pendengaran dan penglihatan di sini melambangkan alat menerima informasi, sedang *fu'ād* (hati nurani/akal budi) melambangkan proses internal memahami dan meyakini sesuatu. Jadi secara ringkas, Allah memerintahkan agar manusia hanya mengikuti hal-hal yang diketahui kebenarannya, jangan sembarang ikut kata orang atau menyimpulkan tanpa bukti. Karena kelak, kemampuan mendengar, melihat, dan memahami yang Allah karuniakan akan ditanya, sudahkah digunakan dengan benar? Ini ayat yang cakupannya luas, mencakup etika mencari ilmu, etika berbicara, bahkan etika berkeyakinan (tidak boleh meyakini tanpa dasar). Secara langsung, terkait tema informasi, ayat ini melarang menyebar atau mempercayai kabar yang belum dipastikan ilmunya (senada dengan QS 49:6, hanya lebih general). Juga mengisyaratkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas penggunaan indera dan akalnya dalam menanggapi informasi.

Penafsiran At-Tabari: Dalam menafsirkan QS 17:36, Al-Tabari menjelaskan bahwa maksud “jangan mengikuti apa yang engkau tidak punya ilmu tentangnya” adalah jangan mengatakan ‘aku telah melihat’ padahal tidak melihat, atau ‘aku telah mendengar’ padahal tidak mendengar, atau ‘aku tahu’ padahal tidak tahu. Al-Tabari mengutip riwayat dari Ibnu Abbas yang menafsirkannya demikian, menyoroti larangan berdusta atau mengada-ada berdasarkan asumsi. Menurut tafsirnya, Allah melarang hamba-Nya menyatakan sesuatu tanpa dasar pengetahuan yang valid baik dalam konteks membuat kesaksian, menyebar cerita, maupun berfatwa atau berpendapat tentang agama tanpa ilmu. Jadi, At-Tabari menekankan aspek *kejujuran intelektual*: hanya ikutilah pandangan yang engkau tahu benar, jika tidak tahu lebih baik diam atau cari tahu dulu.

Penafsiran Quraish Shihab: Quraish Shihab menafsirkan QS 17:36 juga dengan menekankan larangan berbicara atau mengambil keputusan tanpa pengetahuan yang cukup. Dalam Al-Mishbah, kemungkinan ia menjelaskan kata “*taqfu*” (jangan mengikuti) dengan makna “jangan mengikuti suatu kabar, kepercayaan, atau dugaan yang Anda sendiri tidak memiliki dasar ilmu tentangnya”. Quraish menjadikan ayat ini dalil pentingnya tabayyun (lagi-lagi) dan tafakkur (berpikir). Ia sering mengaitkan ayat ini dengan tema tanggung jawab akal: bahwa Islam mendorong penggunaan akal sehat dan bukti empirik dalam meyakini sesuatu, tidak asal ikut atau asal percaya.

Dalam konteks modern, Quraish dapat saja menyinggung contoh: misalnya jangan forward berita dari media sosial sebelum Anda sendiri yakin kebenarannya, karena itu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Atau jangan percaya rumor di internet tanpa cross-check, sebab akan ditanya nanti kenapa telinga mendengar gosip tapi tak dicek, kenapa mata lihat judul provokatif tapi tak teliti isi, kenapa hati langsung percaya tanpa verifikasi. Tafsir Al-Mishbah sangat mungkin memasukkan contoh-contoh sehari-hari seperti itu agar pembaca memahami aplikasinya.

Baik At-Tabari maupun Quraish Shihab memandang ayat ini meneguhkan konsep pertanggungjawaban individual. Tidak ada perbedaan berarti dalam pemahaman mereka, hanya Quraish mewarnai dengan isu modern. Sebagai contoh, Quraish Shihab boleh jadi menyoroti bahwa di era

informasi, banyak orang dengan mudah share berita palsu padahal di akhirat kelak telinga dan jari-jemarinya (sebagai representasi perbuatan, di sini tangan mengetik pun bisa analog dengan penglihatan/hati) akan ditanya mengapa menyebarkan sesuatu yang tidak diketahui kebenarannya. Begitu juga meyakini hoaks atau teori konspirasi tanpa bukti dianggap melanggar perintah Allah ini. Intinya, kedua mufasir mengajarkan kehati-hatian epistemik: *“think before you act or speak exactly what the text says”*.

a. Kesesuaian dan Pertentangan dengan Pemikiran Baudrillard

Dalam perspektif Jean Baudrillard, QS 17:36 menyentuh inti masalah yang ia kritik: manusia modern sering mengikuti arus informasi tanpa memastikan kebenaran, terhanyut dalam simulasi. Ayat ini melarang persis hal itu: “jangan ikuti apa yang kamu tidak tahu ilmunya.” Baudrillard melihat masyarakat yang “tidak peduli bahwa mereka telah menjadi tawanan mitos (simulakra), mereka menikmati bayang-bayang itu”. Ayat ini seolah turun untuk mencegah orang menjadi tawanan bayang-bayang.

- 1) Kesesuaian (pro): Baik Quran (dalam ayat ini) maupun Baudrillard menilai negatif kecenderungan ikut-ikutan buta. Baudrillard menyebut masa kini ditandai “ketidakberpikiran para pengguna” teknologi yang bertindak/percaya tanpa refleksi. Ayat menyuruh kita jangan tak berpikir (harus punya ‘ilmu’) sebelum mengikuti sesuatu. Nilai yang diusung: kritis dan sadar. Baudrillard juga mengutarakan bahwa di hiperrealitas, alat indera kita dibombardir oleh citra-simulasi sehingga bingung membedakan nyata/palsu. Ayat 17:36 menekankan setiap indera akan ditanya artinya Allah menyuruh kita memanfaatkan indera dengan benar agar tidak terkecoh. Dengan kata lain, agama mengingatkan supaya jangan sampai telinga-mata-hati tertipu gambaran palsu. Baudrillard sendiri mengibaratkan manusia modern seperti narapidana di layar (mirip tawanan gua Plato), tidak memanfaatkan akal kritis mereka. Ini cocok dengan larangan QS 17:36: jangan jadi follower buta, pakai akalmu. Seandainya masyarakat mematuhi ayat ini, gejala hiperrealitas yang Baudrillard keluhkan bisa diminimalkan karena orang akan selalu mempertanyakan: “Apakah info ini benar? Apa buktinya? Saya tidak akan ikut menyebar atau percaya sebelum tahu pasti.” Itu ideal melawan banjir simulasi.
- 2) Pertentangan (kontra): Baudrillard mungkin akan menggarisbawahi satu hal: Qur'an menempatkan akuntabilitas akhir pada penghakiman Allah (akhirat). Ia, sebagai pemikir postmodern sekuler, tidak membawa konsep akhirat atau dosa spiritual. Ia melihat konsekuensi dalam istilah sosial-kultural (manusia kehilangan realitas, masyarakat penuh misinformasi). Dari sudut pandang Baudrillard, ayat ini hebat sebagai nasihat individual, tapi tantangan nyata di era modern adalah sistemik: simulasi diciptakan oleh media korporat, algoritma, kepentingan politik. Apakah cukup mengatakan ke individu “jangan ikuti tanpa ilmu”? Baudrillard barangkali skeptis bahwa individu mampu melawan sistem simulasi yang masif hanya dengan niat pribadi. Ini tidak berarti ia menolak prinsip tersebut; hanya ia akan bilang problemnya lebih besar dari sekadar moral personal. Sedangkan Qur'an (dalam ayat ini) berbicara pada individu mukallaf satu-persatu agar bertanggungjawab atas alat inderanya. Di sinilah ada sedikit perbedaan fokus: Baudrillard menyoroti kerangka makro (struktur masyarakat hiperreal), Qur'an menitikberatkan tanggung jawab mikro (pribadi). Tetapi keduanya tak benar-benar bertentangan, justru melengkapi level analisis berbeda.

Pandangan Baudrillard yang ekstrem juga mengatakan *“maps precede territories”* simulasi mendahului realita. Bagi orang beriman, pernyataan seperti ini terdengar fatalistik, seolah manusia tak bisa lagi “punya ilmu yang benar” karena yang ada hanya peta palsu. Qur'an jelas optimis: jangan ikuti yang

tak berilmu, berarti implisit “ikuti yang berilmu/nyata, kamu bisa membedakannya”. Baudrillard seakan pesimis manusia bisa keluar dari jebakan citra (paling tidak tanpa upaya luar biasa). Maka, ideologi Quran percaya pada kapasitas manusia untuk menemukan ilmu kebenaran (dengan wahyu sebagai petunjuk besar), sedangkan Baudrillard menggambarkan dunia dimana kebenaran telah tercerai berai. Ini perbedaan episteme.

Namun, bukan berarti Baudrillard menolak ada *truth at all*, dia memotret gejala. Dalam beberapa hal, Baudrillard menyadari manusia masih punya *consciousness*. Hanya, ia cenderung menunjukkan sisi gelap: “akal Prometheus meredup” di era klik. QS 17:36 justru menyalakan kembali “api Prometheus” itu dengan perintah memaksimalkan akal dan indera. Secara ideal, Baudrillard pasti mendukung seruan tersebut meskipun ia ragu seberapa efektif di tataran realitas sekarang.

Kesimpulannya, nilai QS 17:36 sangat “Baudrillardian” dalam semangat kritisnya terhadap informasi palsu. Ia mengajarkan *counter-simulacrum attitude* jauh sebelum istilahnya ada. Setiap orang muslim diwanti-wanti agar tak gampang percaya apa pun tanpa verifikasi ini vaksin terhadap virus hiperrealitas. Ide pertanggungjawaban indera pun menyiratkan *self-awareness* yang Baudrillard inginkan masyarakat punya (sayangnya dalam analisisnya masyarakat kehilangannya). Walau Baudrillard tak bicara eskatologi, teguran moral Qur'an dan analisis Baudrillard sama-sama memperingatkan bahaya *ignorance dan credulity*. Pro-kontra antara keduanya lebih pada tingkatan filsafat (optimisme vs pesimisme epistemologis), tapi secara etis dan fenomenologis, mereka sejalan.

b. Kesesuaian dengan Pemikiran Hardiman

Ayat “jangan mengikuti apa yang kau tak punya ilmu tentangnya” mungkin adalah intisari “etika klik” versi Al-Qur'an yang paling lugas. Oleh karena itu, dengan F. Budi Hardiman, tentunya terdapat keselarasan yang kuat. Hardiman mendorong setiap netizen berpikir kritis sebelum klik, sejalan dengan perintah ayat agar tak bertindak tanpa pengetahuan. Hardiman juga mengingatkan bahwa *setiap tindakan klik memiliki potensi global* dan bisa berbahaya jika tanpa pikir ini mirip gagasan pertanggungjawaban: walau mungkin versi Hardiman bukan di akhirat tapi *di dunia* (dampak sosial langsung). Mari kita elaborasi:

- 1) Tidak mengikuti tanpa ilmu atau verifikasi dulu: Hardiman menekankan verifikasi sebagai kunci etika media sosial. Dalam banyak kesempatan, ia bicara pentingnya *digital literacy* dan sikap skeptis terhadap info di internet. QS 17:36 adalah payung besar tabayyun. Tadi sudah disebut bahwa QS 17:36 sering disitir dalam literatur Islam modern untuk mendukung literasi informasi. Hardiman tentunya setuju seratus persen bahwa jangan share berita tanpa cek, jangan percaya rumor tanpa konfirmasi – inilah “tidak mengikuti tanpa ilmu”. Sikap sceptical inquiry yang Hardiman anjurkan adalah implementasi perintah ayat.
- 2) Pendengaran, penglihatan, hati dimintai tanggung jawab: Dalam konteks sekuler, Hardiman bisa mengartikan itu sebagai analogi moral: setiap orang harus bertanggung jawab atas informasi yang ia konsumsi (baca/dengar/lihat) dan atas sikap hatinya (apakah kritis atau mudah termakan emosi). Hardiman berbicara tentang “Pengguna gawai tidak peduli bahwa mereka tawanan mitos di layar; mereka tampaknya menikmati bayang-bayang itu ini artinya pengguna tak bertanggung jawab menggunakan indera dan akalnya, mereka larut begitu saja. Ia mengajak “filsafat menjalankan tugasnya” yakni mengasah akal agar orang peduli kebenaran. Ini sejalan dengan makna ayat: Allah memerintahkan agar indera dan akal dipakai sebagaimana mestinya (untuk mencari kebenaran), karena

kelak diminta pertanggungjawaban. Hardiman mungkin akan mengungkapkannya: setiap klik atau share, Anda bertanggung jawab terhadap konsekuensinya. Hal itu sering ia utarakan sebagai kesadaran etis.

- 3) Akuntabilitas personal: Hardiman meski berbicara level masyarakat, ia juga sering menekankan peran individu. Dalam orasinya, ia menyebut “saat ini setiap orang seolah bisa jadi produser, sutradara, ahli bagi orang lain” di internet. Maka tanggung jawab moral pun ada pada tiap orang. Ini persis dengan ayat yang bicara “kamu (secara individu) jangan ikut sesuatu tanpa tahu”. Tak ada kontras di sana. Hardiman yang banyak terinspirasi Immanuel Kant (lihat misalnya *Seni Memahami* terkait hermeneutika) tentu mendukung prinsip *Sapere aude* (beranilah berpikir sendiri, jangan ikut-ikutan) – QS 17:36 adalah perumusan Qur’ani semangat *Sapere aude*. Jadi Hardiman dan Qur’an bergandengan memajukan individu yang berpikir mandiri dan bertanggung jawab.

Apakah ada *pertentangan*? Hampir tidak ada dalam tataran nilai. Mungkin Hardiman akan menambahkan konteks seperti perlunya pendidikan atau regulasi untuk membantu orang tidak mudah tertipu (peran negara/masyarakat). Tapi itu pun bukan kontra, hanya komplemen. Landasan Hardiman rasional-humanistik bertemu landasan Qur’an ilahiah pada kesimpulan moral yang sama: jauhi sikap ikut-ikutan bodoh, gunakan karunia akal secara maksimal. Keduanya ingin menciptakan *public sphere* di mana percakapan berdasarkan pengetahuan, bukan hoaks atau propaganda kosong.

Secara keseluruhan, tafsir QS 17:36 mendukung gagasan Hardiman soal *critical thinking before action*. Hardiman barangkali sangat senang mengutip ayat ini (jika ia mau), karena memperkuat argumennya dengan otoritas religius dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius. Dan memang beberapa cendekia Muslim sudah menggunakan ayat ini dalam diskursus melawan hoaks. Jadi hubungan keduanya komplementer: Hardiman memberikan analisis konteks modern yang menunjukkan *mengapa* ayat ini semakin penting sekarang sedangkan ayat memberikan *landasan normatif absolut* atas ajakan Hardiman. Tak ada konflik kecuali Hardiman tidak memasukkan unsur eskatologis; tapi itu bukan pertentangan nilai, cuma perbedaan lingkup pembahasan.

KESIMPULAN

1. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran QS Al-Hujurat [49]: 6 Secara lebih rinci, penelitian ini menemukan persamaan dan perbedaan pendekatan antara tafsir klasik Ibnu Jarir *At-Thabari* dan tafsir modern Al-Misbah terhadap QS 49:6. Persamaannya, keduanya menegaskan larangan mempercayai kabar dari orang fasik tanpa penyelidikan terlebih dahulu. *At-Thabari* menyebut bahwa Allah memerintahkan kaum beriman untuk “mencari kejelasan” (*tabayyun*) jika datang berita dari pembawa berita yang diragukan kredibilitasnya, agar kaum beriman tidak menjatuhkan hukuman atau tindakan kepada suatu kaum dalam keadaan jahil (tanpa tahu fakta) yang berakibat penyesalan di kemudian hari. Quraish Shihab pun menafsirkan *fatabayyanu* sebagai “telitilah dengan cermat”, dan menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan *adab* bagi orang berakal sehat: ketika menerima berita terutama dari orang yang kredibilitasnya diragukan, seorang mukmin wajib meneliti dan tidak langsung mempercayainya. Perbedaannya, *At-Thabari* sangat menekankan *asbābun nuzūl* (konteks historis) ayat ini, dengan menceritakan secara detail peristiwa Al-Walid bin ‘Uqbah tersebut dan menyebut Al-Walid sebagai contoh *fāsiq* (orang yang tidak taat) yang menjadi sebab turunnya ayat. Sementara itu, Quraish Shihab setelah menjelaskan konteks sejarah, lebih menyoroti hikmah universal ayat: beliau menekankan logika

di balik perintah tabayyun, bahwa langkah dan keputusan harus didasarkan pada pengetahuan (ilmu) yang jelas, lawan dari kebodohan (*jahālah*). Quraish mencatat bahwa tindakan tergesa-gesa tanpa klarifikasi adalah bentuk *jahālah* yang berbahaya, dan sebaliknya sikap tabayyun akan menjaga masyarakat dari tindakan ceroboh yang merugikan. Selain itu, Quraish Shihab memberikan catatan sosial kontemporer: di masyarakat modern yang serba digital, informasi yang tersebar luas belum tentu terjamin kebenarannya.

2. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran QS Al-Isra' [17]: 36 Penafsiran *At-Thabari* atas ayat ini menekankan larangan Allah bagi manusia untuk berbicara, berbuat, atau mengambil sikap atas dasar sangkaan belaka atau informasi yang belum jelas. Segala hal yang tidak diketahui kebenarannya secara yakin tidak boleh diikuti, karena setiap indra dan akal manusia kelak akan ditanya oleh Allah apakah telah digunakan sesuai kebenaran. *At-Thabari* mengaitkan ayat ini dengan konsep tanggung jawab individual: pendengaran, penglihatan, dan hati (akal) manusia merupakan alat untuk mencari ilmu, sehingga dosa besar jika disalahgunakan untuk mengikuti kesesatan atau kabar yang tak berdasar. Tafsir Al-Misbah sejalan dalam memaknai ayat ini, dengan penjelasan yang lebih aplikatif terhadap kehidupan sehari-hari. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan larangan mengikuti sesuatu secara membabi-buta tanpa pengetahuan yang valid, suatu prinsip yang menjadi landasan sikap ilmiah dan kritis. Beliau menyoroti bahwa Islam sangat menghargai penggunaan akal pikiran: setiap Muslim diwajibkan menggunakan pendengarannya (mendengar informasi), penglihatannya (melihat bukti), dan hatinya (nalar) secara optimal untuk mencari kebenaran, bukan sekadar menerima klaim tak berdasar. Dengan demikian, Quraish Shihab mengaitkan QS 17:36 dengan perlunya sikap skeptis yang sehat tidak gampang percaya sebelum ada bukti atau ilmu yang mendukung satu informasi. Tafsir modern juga menyebut bahwa di era banjir informasi kini, pesan ayat ini kian relevan masyarakat dituntut lebih berhati-hati menyikapi berita atau narasi di media, jangan mudah termakan hoaks hanya karena banyak beredar. Secara ringkas, baik tafsir klasik maupun modern sepakat bahwa QS Al-Isra' 36 menegaskan etika epistemologis Islami yaitu larangan mengikuti kabar angin, gosip, atau dugaan yang tidak memiliki landasan ilmu yang jelas. Hal ini konsisten dengan temuan di dua ayat sebelumnya, mengukuhkan benang merah bahwa Al-Qur'an mengajarkan verifikasi, penggunaan akal, dan tanggung jawab moril dalam menerima dan menyebarkan informasi.
3. Relevansi Nilai Tafsir terhadap Konteks Digital Saat Ini Salah satu kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa pesan-pesan etis dalam ketiga ayat yang dikaji memiliki relevansi langsung terhadap fenomena *literasi digital* dan maraknya *disinformasi* di era modern. Tafsir Quraish Shihab, khususnya, secara eksplisit menghubungkan ayat-ayat tersebut dengan kondisi masyarakat mutakhir. Dalam penafsiran QS 49:6, Quraish Shihab menekankan bahwa sikap tabayyun harus dijadikan landasan bagi masyarakat agar terhindar dari provokasi hoaks, *fake news*, *hate speech*, dan propaganda di media sosial. Beliau mengingatkan, di tengah melimpahnya arus informasi di era *post-truth*, kebenaran sering kali tercampur dengan kebohongan, sehingga umat perlu kembali kepada petunjuk Al-Qur'an sebagai solusi atas problematika ini. Pesan moral yang digarisbawahi adalah jangan mudah mempercayai berita hanya karena viral atau sesuai dengan sentimen kita khususnya jika berita itu menyangkut nama baik seseorang atau kelompok melainkan cek ulang kebenarannya sesuai ajaran Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai Quranik mengenai verifikasi, kehati-hatian, dan tanggung jawab informasi ternyata sangat relevan sebagai landasan etika bermedia di era digital. Bahkan dapat

- dikatakan, prinsip *tabayyun* adalah bentuk literasi digital religius yang ditawarkan Islam sebelum “mengklik” tombol share, seorang Muslim harus berpikir kritis dan meneliti apakah informasinya sah atau tidak, sebagaimana perintah QS 49:6. Kesimpulan ini sejalan dengan pandangan para ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer di Indonesia yang mulai menyerukan gerakan “Saring sebelum Sharing” sebagai implementasi langsung dari ajaran *tabayyun*. Dengan demikian, studi tafsir ini menjembatani teks wahyu dengan konteks tantangan zaman: menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki *spirit* yang mampu menjawab masalah disinformasi modern dengan menawarkan solusi akhlak informasi yang luhur.
4. Hubungan Tafsir Al-Qur'an dengan Pemikiran Jean Baudrillard Penelitian ini menyoroti keselarasan dan perbedaan antara tafsir Al-Qur'an dan pemikiran Jean Baudrillard mengenai disinformasi di era digital. Baudrillard, filsuf postmodern, terkenal dengan gagasannya tentang *simulakra* dan *hiperrealitas*, yakni kondisi ketika citra dan informasi mendominasi hingga kabur batas antara kenyataan dan kepalsuan. Dalam konteks ini, berita palsu atau *fake news* menjadi bentuk nyata dari simulasi yang dianggap sebagai realitas meski tidak memiliki dasar faktual. Pandangan ini relevan dengan peringatan Al-Qur'an agar umat Islam tidak mengikuti sesuatu yang tidak diketahui hakikatnya (QS Al-Isrā' [17]: 36), dan agar memverifikasi kabar (QS Al-Hujurat [49]: 6). Tafsir klasik dan kontemporer sama-sama menekankan perlunya *tabayyun* sebagai bentuk sikap kritis terhadap informasi yang berpotensi menyesatkan. Namun, pendekatan keduanya berbeda. Baudrillard bersifat deskriptif-pesimis: ia melihat masyarakat modern terjebak dalam citra tanpa realitas, menciptakan *suspensi realitas*. Sementara itu, Al-Qur'an bersifat normatif-solutif: memberikan arahan untuk kembali kepada kebenaran melalui verifikasi, akal sehat, dan petunjuk wahyu. Islam tetap optimis bahwa kebenaran (al-ḥaqq) dapat ditegakkan di tengah banjir informasi.
 5. Hubungan Tafsir Al-Qur'an dengan Pemikiran F. Budi Hardiman Penelitian ini menyoroti relevansi pemikiran F. Budi Hardiman dalam diskursus literasi digital, khususnya bagaimana konsep “*homo digitalis*” menggambarkan manusia modern yang larut dalam teknologi, terutama smartphone. Hardiman menyebut perangkat ini sebagai *genius malignus*, simbol dari kecerdasan buatan yang menyesatkan, karena mengaburkan realitas dan melemahkan daya kritis masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat keselarasan dengan ajaran Al-Qur'an yang memperingatkan umat Islam agar berhati-hati terhadap informasi yang menyesatkan, dengan prinsip *tabayyun* sebagai fondasi. Hardiman menyatakan bahwa kecanduan digital membuat manusia cenderung mencari informasi instan dan menghindari refleksi. Akibatnya, masyarakat menjadi pasif dan mudah terseret arus hoaks. Dalam tafsir Al-Qur'an, sikap skeptis yang sehat sebagaimana terkandung dalam perintah *fatabayyanu* adalah bentuk nyata dari nalar kritis yang ia idealkan. Keduanya menekankan pentingnya verifikasi informasi, introspeksi, dan pendidikan kritis untuk membangun masyarakat yang tangguh terhadap disinformasi. Meskipun Al-Qur'an berdiri pada landasan transendental (ketaatan kepada Allah), dan Hardiman berbicara dari ranah filsafat sekuler (rasionalitas publik), keduanya berangkat dari semangat yang serupa: menolak kebohongan dan menegakkan kebenaran. Islam memberikan dimensi spiritual-moral pada literasi digital, sementara Hardiman menyodorkan kerangka humanisme kritis sebagai strategi melawan era post-truth. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perpaduan nilai-nilai Qur'ani dan gagasan filsafat kontemporer dapat memperkaya pendekatan etis dalam menghadapi tantangan informasi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilia, Sella, Rumba Triana, dan Syaiful Rokim. "Pandangan Al-Qur'an Terhadap Realitas Hoax." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, (7 Juni 2018), Vol. 03, No. 01. Lihat dalam: <https://doi.org/10.30868/at.v3i01.254>. Diakses pada tanggal 29 November 2024.
- Ahmad, Supriyadi, dan Husnul Hotimah. "Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol. 05, No. 03, 2018, hal. 291–306. Lihat dalam: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10366>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2024.
- Aksin, Nur, dan Sunan Baedowi. "Berita Bohong (Hoax) Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Informatika Upgris*, (1 Juni 2020): Vol. 06, No. 01. Lihat dalam: <https://doi.org/10.26877/jiu.v6i1.6792>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2024.
- Alimi, Moh Yasir. *Mediatisasi Agama, Post Truth Dan Ketahanan Nasional: Sosiologi Agama Era Digital*. Yogyakarta: LKiS, 2018.
- Alisyahbana, Takdir. "Hoax Dalam Perspektif Islam." *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 17, No. 02, (30 September 2019): 103–25. Dalam: <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v17i02.107>. Diakses pada tanggal 29 November 2024.
- Amir, Mafri. *Literatur Tafsir Indonesia*. Jakarta: Mazhab Ciputat, 2013. Arifin, Moch. "Pandangan Al-Qur'an Dalam Merespons Fenomena Hoax: Kajian Tafsir Tematik." *Al Itqan: Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 04, No. 01 (20 Februari 2018): 91–111. Lihat dalam: <https://doi.org/10.47454/itqan.v4i1.681>. Diakses tanggal 3 Desember 2024.
- Bachtiar, Andi Youna, Didin Hikmah Perkasa, dan Mochamad Rizki Sadikun. "Peran Media Dalam Propaganda." *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 13, No. 02 (2016). Lihat dalam: <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/165>. Diakses pada tanggal 29 November 2024.
- Choiroh, Lailatul Utiya. "Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 03, No. 02 (2017): 325–48. Lihat dalam: <https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.325-348>. Diakses pada tanggal 29 November 2024.
- Cover, Rob, Ashleigh Haw, dan Jay Daniel Thompson. *Fake News in Digital Cultures: Technology, Populism and Digital Misinformation*. Bingley: Emerald Group Publishing, 2022.
- Ermawati, Ermawati, dan Sirajuddin Sirajuddin. "Berita Hoax Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 17, No. 01 (2018): 27–50. Lihat dalam: <https://doi.org/10.30631/tjd.v17i1.66>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2024.
- Hadiyat, Yayat D. "Clickbait on Indonesia Online Media." *Jurnal Pekommas*, Vol. 04, No. 01 (11 April 2019): 1–10. Lihat dalam: <https://doi.org/10.30818/jpkm.2019.2040101>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2024.
- Idris, Idnan A. *Klarifikasi Al-Qur'an Atas Berita Hoaks*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Igisani, Rithon. "Kajian Tafsir Mufassir di Indonesia." *Potret Pemikiran*, Vol. 22, No. 01 (1 Juli 2018). Lihat dalam: <https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.757>. Diakses pada tanggal 29 November 2024.
- Kadir, Salim M Daud Abdul dan Sahrizal Vahlepi. "Mendalami Informasi Dengan Bertabayun Menurut Al-Qur'an Ditinjau Dari Tafsir Klasik Dan Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 21, No. 2, 2021: 825–831.
- Maulana, Luthfi. "Hoax Dalam Al-Qur'an: Perspektif Tafsir Tematik." *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2018. Lihat dalam: <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32658/>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2024.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2000.
- , ed. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- , *Menyingkap Tabir Ilahi Asma'ul Husna dalam Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.

- Shunhaji, Akhmad. "Pendidikan Anti *Hoaks* Era 4.0 Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 16, No. 01 (31 Januari 2020): 37–54. Lihat dalam: <https://doi.org/10.21009/JSQ.016.1.03>.
- Tabari (at), Muhammad b. Jarir. *Jami Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*. Vol. 22. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2000.
- Tim Penyusun. "*Status Literasi Digital di Indonesia 2022*," Jakarta: Ditjen Aptika, 2022.
- Triyono, Agus. *Komunikasi Kritis & Ancaman Hoaks*. Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020.
- Tsaniyah, Naimatus dan Kannisa Ayu Juliana "Literasi Digital Sebagai Upaya Menangkal Hoax Di Era Disrupsi," *al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Waziyadatunnisa. "Tabayun Di Media Sosial Menurut QS. Al Hujurat Ayat 6 (Studi Kasus Akun Facebook Forum Anti Fitnah Hasut Dan Hoax)," *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Wirdiyana, Salwa Sofia. "*Hoaks* Dan AlQur'an: Upaya Membangun Peradaban Kritis Dalam Menerima Berita Dan Adab Dalam Berkomunikasi." *Islamic Communication Journal*, Vol. 04, No. 02 (27 Desember 2019): 146–66. Lihat dalam: <https://doi.org/10.21580/icj.2019.4.2.4014>.
- Zaini, Zaini. "Antisipasi Hoax Di Era Informasi: Pendidikan Karakter Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 6." *Ngaji: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 01, No. 01 (1 Maret 2021): 1–24.
- Zaluchu, Sonny Eli. "Dinamika Hoax, Post-Truth Dan Response Reader Criticism Di Dalam Rekonstruksi Kehidupan Beragama." *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 10, No. 01 (12 Maret 2020): 98–117. Lihat dalam: <https://doi.org/10.15642/religio.v10i1.1310>.